

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2019**

## **KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### **B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

### **C. Format Laporan Kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan;

Sub Bagian Produk Hukum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan panitia khusus;
- b. melakukan fasilitasi rapat kerja, koordinasi dan/atau konsultasi panitia khusus;
- c. menyusun laporan rapat kerja, koordinasi dan/atau konsultasi panitia khusus;
- d. menyiapkan penyusunan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Raperda
		Tersusunnya Produk Hukum	80 Produk Hukum

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Raperda	8 Raperda	100%
		Jumlah Produk Hukum	80 Produk Hukum	75 Produk Hukum	9,4%

Pada indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik, dari target tahun 2019 sebanyak 8 Raperda terealisasi semua (100%).

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Membuat scedule atau perencanaan yang matang terkait pembahasan Raperda mengingat Tahun 2020 merupakan tahun dimana dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah;
- b. Menyesuaikan target dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- c. Mengontrol secara rutin terkait pertanggungjawaban kegiatan.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

.....  
.  
.....  
.  
.....  
.  
.....  
.  
.....  
.

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub Bagian Produk Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Kepanjen, Januari 2020

Mengetahui  
Kepala Bagian Perundang-undangan,

Kepala Sub Bagian Produk Hukum,

**WINARTO, SH, MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650920 199202 1 002

**AGUS PITONO AJI, S.Kom. MAP.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720824 200604 1 017

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

## STAF SUB BAGIAN PRODUK HUKUM

### SEMESTER II

#### A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

#### B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

#### C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Staf Bagian Produk Hukum mempunyai tugas:

- a. Menata Dokumen Produk Hukum, Surat Keputusan DPRD
- b. Menata Dokumen SPJ
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Produk Hukum sesuai bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja TAHUN 2019 Semester I :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen Produk Hukum dan Surat Keputusan DPRD yang dikelola	60 dokumen
		Jumlah SPJ Perjalanan Dinas pembahasan Raperda	18 dokumen

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan ;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah dokumen yang dikelola	78	66	85 %

Pada indikator sasaran tersebut dari target Tahun 2019 Semester II sebesar 78 dokumen dengan realisasi sebesar 66 dokumen.

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Adanya peningkatan kinerja pada masing-masing staf Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi staf sesuai jadwal yang ditentukan.

5. Tanggapan Atasan Langsung ;

.....  
...  
.....  
...  
.....  
...

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Subbag Produk Hukum dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui  
Kepala Sub Bagian Produk Hukum  
Kabupaten Malang

Kepanjen, Januari 2020  
Staf Sub Bagian Produk Hukum

**AGUS PITONO AJI, S.Kom, M.AP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19720824 200604 1 017

**ROHMATUL KAMILAH**

**LAPORAN KINERJA TAHUN 2019**  
**STAF SUB BAGIAN PRODUK HUKUM BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Pengertian Pelaporan Kinerja**

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

**B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

**C. Format Laporan Kinerja**

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan;
  - 1) melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan panitia khusus;
  - 2) melakukan fasilitasi rapat kerja, koordinasi dan/atau konsultasi panitia khusus;
  - 3) menyusun laporan rapat kerja, koordinasi dan/atau konsultasi panitia khusus;
  - 4) menyiapkan penyusunan Surat Keputusan Sekretariat DPRD; dan
  - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Raperda
2		Jumlah Produk hukum yang diterbitkan	30 Dokumen

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Raperda	8 Raperda	100%
		Jumlah Produk hukum yang diterbitkan	30 Dokumen	25 Dokumen	83%

**3.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Pada Tahun 2019 ditargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 8 (delapan) Raperda berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Dari 8 (delapan) target tersebut DPRD Kabupaten Malang telah melakukan pembahasan keseluruhan Raperda tersebut, antara lain sebagaimana terlampir.

**3.2. Surat Keputusan Sekretaris DPRD**

Sesuai dengan perjanjian kinerja individu tahun 2019 ditargetkan menyusun 30 Keputusan Sekretaris DPRD, terealisasi sebanyak 25 Keputusan. Tidak terpenuhinya target tersebut dikarenakan terdapat jabatan fungsional yang memerlukan Keputusan Sekretaris DPRD tetapi jabatan tersebut ditiadakan.

**4. Rencana Tindak Lanjut;**

Secara kuantitas bahwa target pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum pada Tahun 2019 yang telah di bebaskan sesuai dengan Perjanjian Kinerja telah terealisasi 100%, akan tetapi terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang Tahun pembahasannya tidak sama dengan Tahun penetapannya.

**5. Tanggapan Atasan Langsung;**

.....  
.....  
.....  
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Sub Bagian Produk Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Kepanjen, Januari 2020

Mengetahui

**Kepala Sub Bagian Produk Hukum,**

**Staf Sub Bagian Produk Hukum,**

**AGUS PITONO AJI, S.Kom., M.M.**

**SUDARTO, S.H.**

Penata

Penata

NIP. 19720824 200604 1 017

NIP. 19680122 199103 1 007

## **Lampiran :**

### **I. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. Penyelenggaraan Perparkiran;
5. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lawang;
6. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kanjuruhan;
7. Penanaman Modal;
8. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah.

### **II. Keputusan Sekretaris DPRD**

- 1) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/1/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan
- 2) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/ 2 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 3) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/ 3 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Staf Pengelola
- 4) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/ 4 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Staf Pengelola Keuangan Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah
- 5) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/5/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- 6) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/ 6 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)
- 7) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/ 7 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pengurus Gaji Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
- 8) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/10/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen
- 9) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/ 11 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen
- 10) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/12/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Standar Operasional

Prosedur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

- 11) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/13/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil  
Penerima Tambahan Penghasilan
- 12) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/ 14 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/13/Kpts/35.07.041/2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil  
Penerima Tambahan Penghasilan
- 13) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/15/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/13/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil  
Penerima Tambahan Penghasilan
- 14) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/16 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Panitia Penyelenggara  
Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2024
- 15) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/17/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor:  
188.4/ 7 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pengurus Gaji Di Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
- 16) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/ 18 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas  
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/13/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil  
Penerima Tambahan Penghasilan
- 17) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/ 19 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas  
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/13/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pegawai Negeri Sipil  
Penerima Tambahan Penghasilan
- 18) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/ 20 /KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan (PPTK)
- 19) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/21/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Penatausahaan  
Keuangan
- 20) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/22/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen

- 21) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/23/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pembantu Pejabat Pembuat  
Komitmen
- 22) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/24/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Staf Pengelola Keuangan  
Dan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah
- 23) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/25/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Pengadaan  
Barang/Jasa
- 24) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/26/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil  
Pekerjaan (PjPHP)
- 25) Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/27/KPTS/35.07.041/2019 Tentang Pengurus Gaji Di Sekretariat  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

### STAF SUB BAGIAN PRODUK HUKUM BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setian tugas dan fungsi yang di percayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

#### B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

#### C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan/atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

##### 1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan :

- a. Melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan panitia khusus;
- b. Melakukan fasilitasi rapat kerja, koordinasi dan/atau konsultasi panitia khusus;
- c. Menyusun laporan rapat kerja, koordinasi dan/atau konsultasi panitia khusus;
- d. Menyiapkan penyusunan produk hukum DPRD.

##### 2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Raperda
		Jumlah Produk Hukum DPRD	50 Dokumen

**3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Raperda	8 Raperda	100 %
		Jumlah Produk Hukum DPRD	50 Dokumen	50 Dokumen	100%

**3.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Pada Tahun 2019 ditargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sejumlah 8 (delapan) Raperda berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Dari 8 (delapan) target tersebut DPRD Kabupaten Malang telah melakukan pembahasan keseluruhan Raperda tersebut. (lampiran 1)

**3.2 Produk Hukum DPRD**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Individu tahun 2019 ditargetkan menyusun 50 (lima puluh) produk hukum DPRD, terealisasi sebanyak 50 (lima puluh) produk hukum, yaitu 6 (enam) Peraturan DPRD, 40 (empat puluh) Keputusan DPRD; dan 4 (empat) Keputusan Pimpinan DPRD. (lampiran 2)

**4. Rencana Tindak Lanjut;**

Secara kuantitas bahwa target pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum pada Tahun 2019 yang telah di bebaskan sesuai dengan Perjanjian Kinerja telah terealisasi 100%, akan tetapi terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang Tahun pembahasannya tidak sama dengan Tahun penetapannya.

**5. Tanggapan Atasan Langsung;**

.....  
.....  
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja Staf Sub Bagian Produk Hukum Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Kepanjen, Januari 2020

**Mengetahui**  
**KEPALA SUB BAGIAN**  
**PRODUK HUKUM**

**STAF SUB BAGIAN**  
**PRODUK HUKUM**

**AGUS PITONO AJI, S.Kom**  
Penata Tk. I  
NIP. 19720824 200604 1 017

**WINTOYO, SH**  
Penata Muda  
NIP. 19740304 200604 1 011

## **Lampiran 1**

### **Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas Tahun 2019**

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
4. Penyelenggaraan Perparkiran;
5. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lawang;
6. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kanjuruhan;
7. Penanaman Modal;
8. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah.

## **Lampiran 2**

### **Produk Hukum DPRD yang telah dihasilkan tahun 2019**

#### **A. Peraturan DPRD**

1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.
2. Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Malang.
3. Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Malang.
4. Peraturan DPRD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Malang.
5. Peraturan DPRD Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Malang.
6. Peraturan DPRD Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Malang.

#### **B. Keputusan DPRD**

1. Nomor : 188.4/ 1 /KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa
2. Nomor : 188.4/ 2 /KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

3. Nomor : 188.4/ 3 /KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Nomor : 188.4/ 4 /KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Parkir.
5. Nomor : 188.4/5/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang – Undangan.
6. Nomor : 188.4/6/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 Bidang Kesejahteraan Rakyat.
7. Nomor : 188.4/7/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 Bidang Ekonomi Dan Keuangan.
8. Nomor : 188.4/8/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018 Bidang Pembangunan.
9. Nomor : 188.4/9/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2018.
10. Nomor : 188.4/10/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi.
11. Nomor : 188.4/11/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
12. Nomor : 188.4/12/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018
13. Nomor : 188.4/13/KPTS/35.07.040/2019 Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/5/KPTS/35.07.040/2018 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.
14. Nomor : 188.4/14/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

15. Nomor : 188.4/15/KPTS/35.07.040/2019 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2020.
16. Nomor : 188.4/16/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.
17. Nomor : 188.4/17/KPTS/35.07.040/2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Rancangan KUA dan PPAS
18. Nomor : 188.4/18/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa.
19. Nomor : 188.4/19/KPTS/35.07.040/2019 tentang Usulan Pengangkatan Dan Pengesahan Wakil Bupati Malang Menjadi Bupati Malang
20. Nomor : 188.4/20/KPTS/35.07.040/2019 Tentang, Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.
21. Nomor : 188.4/21/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.
22. Nomor : 188.4/22/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.
23. Nomor : 188.4/23/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.
24. Nomor : 188.4/24/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.
25. Nomor : 188.4/25/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024.
26. Nomor : 188.4/26/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Malang Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021.
27. Nomor : 188.4/27/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Malang Sisa Masa Jabatan 2016-2021.
28. Nomor : 188.4/28/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.
29. Nomor : 188.4/29/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.

30. Nomor : 188.4/30/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
31. Nomor : 188.4/31/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal.
32. Nomor : 188.4/32/KPTS/35.07.040/2019 Tentang, Penetapan Calon Terpilih Wakil Bupati Malang Sisa Masa Jabatan 2016-2021.
33. Nomor : 188.4/33/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
34. Nomor : 188.4/34/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya.
35. Nomor : 188.4/35/KPTS/35.07.040/2019 Tentang, Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
36. Nomor : 188.4/36/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
37. Nomor : 188.4/37/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
38. Nomor : 188.4/38/KPTS/35.07.040/2019 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
39. Nomor : 188.4/39/KPTS/35.07.040/2019 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.
40. Nomor : 188.4/40/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020

### C. Keputusan Pimpinan DPRD

1. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor Nomor : 188.4/1/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 Dan Rancangan Peraturan Bupati Malang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

2. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor Nomor : 188.4/2/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Bupati Malang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor Nomor : 188.4/3/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Singosari Tahun 2018-2038.
4. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor Nomor : 188.4/4/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Persetujuan Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 Dan Rancangan Peraturan Bupati Malang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.